

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di penghujung tahun 2019 menuju awal tahun 2020, terdapat sebuah masalah global yang mengguncang seluruh penjuru dunia yaitu Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 terjadi akibat munculnya sebuah virus yang mengancam nyawa manusia dengan penyebarannya yang sangat cepat yaitu *coronavirus Disease*. Wabah ini pada awalnya muncul di wuhan, China dan dengan cepat menyebar ke Negara lain melalui mobilitas penduduk asing yang keluar masuk dari Negara China (Abdul Aziz 2020). *Coronavirus* dengan cepat melanda kurang lebih 200 negara yang menjadikan World Healty Organization (WHO) dengan cepat mengumumkan keadaan darurat kesehatan yang menghawatirkan bagi dunia di tanggal 30 Januari 2020 (Cucinotta and Vanelli 2020).

Pada awal masuknya *Coronavirus* ke Indonesia, virus ini langsung mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap Kondisi Ekonomi di Negara Indonesia yang mengalami penurunan drastis. Pada awal penyebarannya saja, Pandemi Covid-19 langsung menyebabkan kinerja impor Negara indonesia menurun dengan angka yang merosot sebanyak 3,7% dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2020. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 2,3% bahkan menembus angka -0,4% (Indayani and Hartono 2020). Dampak negatif lainnya kemudian terus bertambah parah seiring dengan penyebarannya yang semakin ganas memasuki seluruh penjuru negeri.

Menghadapi permasalahan penyebaran *coronavirus* yang sangat cepat, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebarannya. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dengan penutupan berbagai sektor pekerjaan yang dialihkan menjadi WFO (Work from Home), penutupan sekolah-sekolah dan Universitas, penutupan seluruh pusat perbelanjaan, bahkan larangan keluar dari rumah (Mifrahi and Darmawan 2022).

Penurunan perekonomian yang drastis dan pembatasan mobilitas penduduk ini akhirnya mengakibatkan banyak sektor usaha mengalami masalah keuangan, terutama di bidang jasa, perdagangan dan manufaktur yang mengalami kerugian yang besar. Hal serupa juga dialami oleh berbagai perusahaan besar yang mengalami masalah keuangan dan kerugian yang signifikan yang mana mengharuskan perusahaan perusahaan tersebut melakukan PHK (Pemutusan hubungan kerja) untuk mengurangi anggaran pengeluaran dan tidak sedikit perusahaan yang bangkrut (Yulianti, Khairuna, and Ibrahim 2022). Menurut kemenaker dalam (Yulianti, Khairuna, and Ibrahim 2022) Sebanyak 77% perusahaan formal dan 23% perusahaan informal mem-PHK karyawannya. Hal ini jelas semakin memperburuk keadaan masyarakat yang sebelumnya sudah menghadapi kesulitan. Kondisi ini akhirnya meningkatkan angka pengangguran dan bahkan menimbulkan rasa takut bagi mereka yang masih bekerja.

PHK secara besar besaran di seluruh sektor industri ini, secara cepat juga mengakibatkan lonjakan angka pengangguran. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian dan Ketenagakerjaan di April 2020, perusahaan di

sektor formal yang melakukan phk berjumlah 84.926 perusahaan, sedangkan tenaga kerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang. Sementara itu, di sektor informal nya, terdapat 31.444 perusahaan yang terdampak harus merumahkan karyawannya yang berjumlah 5.38.385 orang. Dengan kata lain, jika dijumlahkan antara sektor formal dan informal, jumlah tenaga kerja yang di phk adalah sebesar 2.084.593 orang. (Mardiyah and Nurwati 2020). Besarnya jumlah jiwa yang di PHK berarti tingkat pengangguran indonesia juga mengalami peningkatan yang besar secara tiba tiba.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada grafik 1.1, bisa dilihat bahwa adanya fluktuasi yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia yaitu dari tahun 2018 hingga 2023, seperti yang di tunjukkan didalam gambar. Fluktuasi ini berarti terdapat dinamika pasar tenaga kerja dan pengaruh faktor eksternal. Jika dilihat, pada tahun 2018, tingkat pengangguran indonesia adalah sebesar 5,34%, yang mana kemudian

mengalami sedikit penurunan menjadi 5,28% pada 2019. Namun, keadaan sangat berubah secara dramatis pada tahun 2020, yang mana tingkat pengangguran mengalami lonjakan pesat menjadi 7,07%, yang artinya meningkat sebesar 1,79% dari tahun sebelumnya. Peningkatan besar ini menunjukkan dampak besar pandemi COVID-19 bagi pasar tenaga kerja Indonesia. Untuk menghentikan penyebaran virus, berbagai sektor ekonomi ditutup, pembatasan mobilitas, dan kebijakan pembatasan sosial diberlakukan. Akibatnya, banyak perusahaan harus melakukan PHK dan mempekerjakan lebih sedikit orang. Akibatnya, tingginya angka pengangguran menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak dapat menyerap angkatan kerja yang terdampak secara langsung oleh pandemi (Mifrahi and Darmawan 2022).

Masalah pengangguran yang sudah sangat krisis di masa pandemi covid-19 ini kemudian terlihat semakin diperparah oleh fakta bahwa penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang pada dasarnya sekolah ini dirancang untuk membentuk lulusan yang siap bekerja BPS (2022). Lulusan SMK/MAK yang merupakan kontributor terbesar terhadap tingkat pengangguran terbuka ini justru menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak bekerja maksimal untuk lulusan SMK/MAK.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Rata-Rata TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD	3,61	3,61	3,59	2,56	2,32
SMP	6,46	6,45	5,95	4,78	4,11
SMA	9,86	9,09	8,57	8,15	7,05
SMK	13,55	11,13	9,42	9,31	9,01
Diploma I/II/III	8,08	5,87	4,59	4,79	4,83
Universitas	7,35	5,98	4,80	5,18	5,25

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Jika dilihat dari tabel 1.1, Meskipun angka pengangguran mulai menurun perlahan, lulusan SMK tetap menjadi penyumbang pengangguran terbesar setiap tahunnya. Masa krisis serangan *Corona Virus* yang mengakibatkan lonjakan pengangguran di tahun 2020, merupakan tahun dengan angka pengangguran tertinggi di periode ini seperti yang sudah dipaparkan pada gambar 1.1. Namun didalam tabel 1.1 kemudian dapat dilihat, pada tahun 2020 juga, lulusan SMK ternyata menjadi kontributor tingkat pengangguran tertinggi di angka 13,55%.

Masalah pengangguran di masa pandemi covid-19 dan lulusan SMK yang menjadi penyumbang terbesarnya, menjadi masalah yang mendesak karena dampaknya yang sangat cepat dirasakan. Jika tidak segera diatasi, masalah pengangguran akan menjadi dasar munculnya masalah lain seperti kelaparan, kemiskinan, kriminalitas, penurunan kinerja ekonomi Negara, bahkan beresiko

mengalami kesulitan ekonomi yang permanen (Wirren Chang et al. 2023). Di dalam kondisi seseorang yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mampu untuk bergabung kedalam pasar tenaga kerja, maka mereka tidak hanya kehilangan pendapatan mereka, namun juga penurunan kualitas hidup mereka. Hal ini terjadi karena secara perlahan mereka akan tidak akan memiliki akses ke dalam pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, yang mana hal ini merupakan menyebabkan kemiskinan.

Dari kasus lonjakan angka pengangguran tersebut, Pemerintah Indonesia pun menyadari diperlukannya kebijakan atau langkah strategis untuk mengatasi dampak serius dari pandemi COVID-19 yang meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Dengan menganalisis kasus yang ada, Pemerintah mengambil tindakan yaitu dengan meluncurkan sebuah program yang bernama Program Kartu Prakerja. Program ini secara resmi diumumkan pada april 2020 dengan tujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada individu yang tidak memiliki pekerjaan atau yang terkena PHK akibat pandemi (Consuello 2020) . Program ini bertujuan untuk membantu peserta memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, membantu mereka memperoleh pekerjaan atau bahkan memulai bisnis mandiri.

Program Kartu Pra Kerja tercantung langsung di dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 36 Tahun 2020 (Consuello 2020). Program Kartu Pra kerja bertujuan untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja, meningkatkan efisiensi dan daya saing angkatan kerja, dan mendorong kewirausahaan yang mana untuk mencapai tujuan ini, Kartu Pra kerja tidak hanya dapat diberikan kepada pencari kerja, tetapi juga dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang

terkena PHK, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah (Ilat, Rorong, and Tumangkeng 2024)

Di dalam praktik pelaksanaan Program Kartu Prakerja, program ini tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga memberikan bantuan keuangan kepada para peserta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama masa pelatihan. Anggaran khusus untuk program kartu prakerja ini, pertama kali ditetapkan hanya Rp 10 triliun untuk mencukupi seluruh para pencari kerja dan korban PHK yang membutuhkan pelatihan. Anggaran ini kemudian dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk kebutuhan pelatihan dan skema bantuan sosial di masa pandemi (Memah, Rares, and Waleleng 2022). Melalui kombinasi pelatihan keterampilan dan insentif keuangan ini, diharapkan akan membantu pemulihan ekonomi secara bertahap dan meringankan beban masyarakat, terutama bagi kelompok usia produktif.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 hingga 2024, program ini telah mencapai 18.987.641 penerima aktif di seluruh Indonesia. Tabel berikut menunjukkan data statistic persebaran penerima program ini, yang menunjukkan rincian distribusi berdasarkan wilayah;

Tabel 1. 2 Statistik Penyebaran Penerima Program Kartu Pra kerja Di Indonesia Tahun 2020-2024

NO	PROVINSI	Jumlah Jiwa Penerima Program Kartu Pra kerja
1	Aceh	493.194
2	Sumatra Utara	956.65
3	Sumatra Barat	509.984
4	Riau	489.763
5	Kepulauan Riau	276.842
6	Jambi	360.69
7	Bengkulu	272.661
8	Sumatra Selatan	602.951
9	Bangka Belitung	213.297
10	Lampung	597.709
11	Banten	936.362
12	DKI Jakarta	1.266.139
13	Jawa Barat	3.045.795
14	Jawa Tengah	1.795.927
15	DI Yogyakarta	317.577
16	Jawa Timur	2.089.923
17	Bali	334.033
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	407.649
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	282.959
20	Kalimantan Barat	415.367
21	Kalimantan Tengah	270.388
22	Kalimantan Selatan	442.714
23	Kalimantan Timur	346.417
24	Kalimantan Utara	89.742
25	Sulawesi Barat	192.772
26	Sulawesi Selatan	672.043
27	Sulawesi Tenggara	274.79
28	Sulawesi Tengah	275.187
29	Gorontalo	167.656
30	Sulawesi Utara	235.549
31	Maluku	165.414
32	Maluku Utara	90.301
33	Papua Barat Daya	21.299
34	Papua Barat	22.802
35	Papua Tengah	16.347
36	Papua Pegunungan	3.157
37	Papua Selatan	13.452
38	Papua	22.139

Sumber: Statistik penerima Kartu Prakerja 2020-2024 (data diolah)

Dari tabel diatas yang memberikan data distribusi program kartu pra kerja tahun 2024, menunjukkan bahwa Program Kartu Pra Kerja telah masuk ke semua provinsi Indonesia. Hal ini berarti pemerintah memiliki komitmen besar untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di negeri dapat mengakses program tersebut, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan terluar. Sejak program diluncurkan pada tahun 2020–2024, pemerataan ini dapat tercapai secara bertahap dan perlahan. Program Kartu Pra Kerja lebih berkonsentrasi pada daerah dengan tingkat pengangguran tinggi dan populasi padat saat awal peluncurannya. Namun, seiring waktu, pemerintah mulai memperluas program dengan mempertimbangkan keseimbangan sosial dan geografis.

Gambar 1.2 Rata rata pendidikan terakhir peserta program pra kerja



Sumber : Statistik Program Kartu Prakerja. (2024).

Gambar 1.2 merupakan gambar yang memperlihatkan komposisi dari peserta yang mengikuti program kartu pra kerja menurut tingkat pendidikan. Komposisi ini dimulai dari tahun 2020 yaitu tahun awal peluncuran program ini hingga tahun 2024. Berdasarkan gambar, peserta dengan lulusan SMA/SMK

sederajat merupakan peserta yang mendominasi program ini. Persentase 2022 merupakan persentase yang paling rendah untuk lulusan SMA/SMK yang mengikuti program kartu Prakerja, namun tetap menjadi peserta terbanyak yaitu di angka 39%. Kemudian pada tahun 2023, terlihat bahwa lulusan SMA/SMK sederajat mencapai angka 74% dan menjadi lulusan yang terbanyak dan paling mendominasi di kalangan peserta program Kartu Prakerja.

Dari fenomena yang dipaparkan diatas, kemudian mempertimbangkan fakta-fakta yang telah ada, Program Kartu Pra Kerja merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah untuk menanggapi lonjakan angka pengangguran yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMK. Program ini dirancang sebagai salah satu solusi multifungsi dengan tujuan menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan keterampilan kerja masyarakat sehingga lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan dunia pasar tenaga kerja.

Keberadaan program kartu pra kerja yang dihadirkan dan secara bertahap sudah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dengan tujuan utama memberikan keterampilan bagi pencari kerja kemudian mempunyai potensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan sendiri merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan populasi dalam sebuah Negara dalam kegiatan ekonomi terkhusus dalam hal ketenagakerjaan yang mana di Indonesia TPAK sendiri dijadikan sebagai parameter oleh pemerintah dalam analisa ekonomi (Reynalda Utari Karo Karo et al. 2023)

Angka jumlah angkatan kerja yang tinggi selalu sejalan dengan tingginya output ekonomi suatu Negara sementara jumlah penduduk atau populasi yang bertambah secara signifikan akan meningkatkan permintaan pasar domestik. Namun pertumbuhan penduduk ini bisa berdampak baik maupun buruk, tergantung pada kemampuan sistem ekonomi Negara untuk menyerap dan memanfaatkan angka angkatan kerja tersebut secara efisien. Maka dari itu, kondisi ini harus didukung oleh tingkat kualitas dan keterampilan sumber daya manusia yang memadai agar tingginya jumlah angkatan kerja tidak justru berdampak bagi angka pengangguran (Novita and Afdal Samsuddin n.d.)

TPAK memberikan gambaran dan persentase besar nya jumlah angkatan kerja yang berada dalam usia aktif bekerja yang mana di Indonesia TPAK juga mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Pada tahun 2019, TPAK tercatat di angka 69,17% yang menurun pada tahun 2020 menjadi 67,77%. Hal ini terjadi akibat seluruh kegiatan ekonomi dibatasi pada saat itu. Namun, secara perlahan angka TPAK juga membaik pada tahun 2021, yaitu meningkat ke angka 68,08 % dan 68,63% pada tahun 2022 yang kemudian terus stabil di tahun-tahun berikutnya.

Angka TPAK yang tinggi selalu berbanding lurus dengan angka pengangguran yang rendah. Dalam kenyataannya, keberadaan TPAK yang tinggi juga harus selaras dengan pekerjaan yang memadai agar pengangguran tidak meningkat. Keberadaan program kartu Pra Kerja merupakan sebuah langkah strategis pemerintah untuk memberikan keterampilan dan daya saing di pasar tenaga kerja terutama bagi mereka yang belum bekerja atau terdampak PHK. Di lain sisi, angka TPAK yang meningkat memberikan gambaran bahwa semakin

banyak populasi yang berada dalam usia siap kerja. Namun meningkatnya TPAK tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja dan pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap sehingga pengangguran meningkat.

Dari fenomena yang dipaparkan diatas, kemudian mempertimbangkan fakta-fakta yang telah ada, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja masih berada didalam kondisi yang tidak baik pasca Pandemi Covid-19. Selain pengangguran yang meningkat akibat banyak nya tenaga kerja yang terkena PHK, kondisi data yang ada juga membuktikan bahwa tingkat pengangguran didominasi oleh lulusan SMA dan SMK Sederajat. Selain itu, Tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia merupakan sebuah parameter yang mencerminkan bagaimana peran masyarakat berkontribusi dalam bekerja, mencari pekerjaan bahkan pelatihan. TPAK juga memegang peran kunci untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja di indonesia. Dengan itu, sangat penting untuk memberi perhatian khusus terhadap TPAK agar kebijakan yang dihadirkan sebagai cara untuk mengurangi pengangguran benar- benar berpengaruh seperti Program Kartu Pra Kerja yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan keterampilan kerja masyarakat sehingga lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan dunia pasar tenaga kerja.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sani et al. 2022) memberikan bukti empiris tentang bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat pengangguran di indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa pandemi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi panel dan variable dummy. Analisis ini kemudian

dilakukan dengan menggunakan data semi-tahunan dari 34 provinsi di Indonesia mulai dari tahun 2018 hingga 2020. Pengangguran data tersebut sangatlah efektif karena mencakup waktu sebelum dan sesudah pandemi. Hasil menunjukkan bahwa pandemic Covid-19 telah memperburuk kondisi pasar tenaga kerja, terutama di wilayah yang rentan terhadap penurunan aktivitas ekonomi.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh (Salsabila et al. 2022) menemukan dan memberikan bukti empiris bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran terbuka. Penelitian dilakukan di provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Dengan menggunakan regresi Probit dan Logit, maka penelitian ini memberikan hasil berupa pertambahan 1% variabel TPAK maka dapat menurunkan TPT di provinsi Jawa Barat.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Johar 2023) di provinsi Banten. Penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka namun terdapat laju pertumbuhan yang berfungsi sebagai mediasi parsial dalam hubungan ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan kemudian akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi pengangguran.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh (Zaki and Kartika Pertiwi 2023) yang dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana program kartu prakerja berdampak pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil yang sangat penting tentang efektivitas program Kartu Prakerja. Penelitian

ini menggunakan sampel penelitian yang mencakup 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan dan memberi bukti hubungan positif antara program Kartu Pra kerja dan penyerapan tenaga kerja, dimana program kartu pra kerja terbukti efektif untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Sejalan dengan fenomena latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Program Kartu Pra kerja terhadap tingkat pengangguran di indonesia. Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat manfaat program ini, masih dibutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana dampak program tersebut dalam jangka panjang di indonesia yang di padukan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rata-rata lama sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi Indonesia yang hingga pada saat ini sulit untuk diatasi, ditambah pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan SMA dan SMK sederajat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk mencari pekerjaan dan mengikuti pelatihan, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran. Fenomena ini kemudian membuat pemerintah merancang berbagai program untuk menekan tingkat pengangguran di indonesia yang mana salah satunya adalah program kartu Prakerja. Berdasarkan gambaran pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya adalah:

1. Apakah terdapat Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 32 Provinsi Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah peserta program kartu Pra kerja terhadap tingkat pengangguran di 32 Provinsi Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap tingkat pengangguran di 32 Provinsi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 32 Provinsi Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh Jumlah Peserta Program Kartu Pra Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di 32 Provinsi Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran 32 Provinsi Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah dan penelitian ini adalah 32 provinsi di Indonesia, yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan seluruh uraian diatas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian akademis dalam bidang ekonomi, khususnya mengenai pentingnya pendidikan yang dibarengi dengan efektivitas program pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran. Lebih lanjut, penelitian ini juga menjadi gambaran untuk bagaimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berpengaruh Terhadap Pengangguran Di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut yang membahas hubungan antara program pelatihan kerja dan perubahan indikator ketenagakerjaan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam melihat bagaimana Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mempengaruhi Pengangguran dan meningkatkan efektivitas Program Kartu Pra Kerja, terutama dalam hal pengelolaan jumlah peserta lebih optimal dalam menekan tingkat pengangguran. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program, seperti pemilihan peserta yang lebih tepat sasaran dan penyusunan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana pengaruh Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan

program kartu Pra kerja terhadap tingkat pengangguran di indonesia khususnya selama periode dilakukannya penelitian, selain itu penelitian ini diharapkan menyediakan wawasan bagi akademisi, mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian terkait program pelatihan kerja dan tingkat pengangguran.